

# Seni Jalanan di Jalan Rancière

*Obed Bima Wicandra*

Jacques Rancière adalah seorang filsuf Prancis yang dikenal karena nyinyir pada filsafat. Alih-alih muncul dari hubungan sosial, filsafat malah tunduk pada ilmu sosial. Kemiskinan dan ketidakadilan hanya dijadikan objek dalam diskusi serius filsuf-filsuf dan ahli sosial dan politik di kafe-kafe.

Dalam konteks kapitalisasi pengetahuan itu, Rancière mengkritik filsuf Prancis, Louis Althusser, yang melakukan pembedaan antara kekuatan intelektual dan kekuatan produktif. Rancière juga membombardir konsep intelektual dan hegemoni milik filsuf Italia, Antonio Gramsci yang mendasarkan pemahaman bahwa perubahan sosial hanya bisa dilakukan dalam mekanisme hierarki.

Politik dalam pandangan Rancière – yang dipengaruhi oleh Plato - adalah mengenai siapa yang memiliki otoritas dalam menentukan penting atau tidaknya suatu isu, juga ada tidaknya kelompok masyarakat tertindas. Politik yang demikian, memunculkan yang namanya konsensus. Konsensus adalah tatanan sosial. Bagian-bagian dalam masyarakat yang diperhitungkan dan menciptakan kesepakatan itu yang kemudian memunculkan struktur atau tatanan sosial yang mendominasi.

Sebaliknya, mereka yang dableg dianggap tidak penting dan berada di luar konsensus. Inilah yang kemudian memunculkan tindakan perlawanan subjek terhadap hierarki dan dominasi. Logika demikian ini disebut sebagai logika subjektivikasi.

Contoh logika subjektivikasi adalah penyebutan identitas (subjek) secara demonstratif di tengah dominasi. Pembangkang asal Blok Timur yang tak segan menyebut dirinya sebagai “hooligan”, kumpulan pembuat onar dalam pertandingan sepak bola. Mirip-mirip saat ada orang Surabaya yang menyebut dirinya “Kami Bonek”, begitulah. Nah, subjektivikasi atas konsensus inilah yang kemudian disebut sebagai disensus.

Ketika konsensus hanya mencatat mereka yang penting dan terhitung, sebaliknya disensus mencatat mereka yang dianggap tidak penting, tidak ada, dan tidak dihitung. Disensus bagi Rancière berarti membuka diskusi atas konflik antara siapa yang ambil bagian dan siapa yang tidak bisa mengambil bagian (*part-of-no-part*). Inti dari politik, menurut Rancière adalah disensus yang mengandaikan keadilan dan kesetaraan yang terus diperjuangkan bukan yang telah ditetapkan.

## **Dablegnya Seni Jalanan**

Seni jalanan kini menempati posisi yang seksi. Dahulu seni jalanan distigma sebagai karya seni yang buruk. Vandalisme. Kini, seni jalanan justru dihadirkan di berbagai kota agar terlihat berbeda, warna-warni, dan ini yang penting: *Instagrammable*.

Tak mengherankan jika kemudian pemerintah kota sibuk membuat peraturan daerah dengan konsensus: jangan corat-coret sembarangan, ijin dahulu kepada otoritas pemilik tembok, jangan membuat visual yang mengkritik pemerintah, dan sebagainya.

Konsensus seperti itu berada pada politik estetik rezim etik. Seni yang didasarkan pada indah dan tidak indah, berdasarkan definisi yang dibuat oleh otoritas kota. Politik estetika semacam ini biasanya memiliki visualitas yang “indah-seperti yang diharapkan”. Mirip-mirip mural di kafe dan restoran, begitulah. Indah untuk dipasang di Instagram.

Bagaimana dengan visualitas yang memunculkan gambar tokoh? Visualitas seperti ini biasanya juga direstui oleh otoritas kota. Gambar Bu Risma, atau legenda sepak bola seperti Eri Irianto (legenda Persebaya) menarik ditampilkan. Visualitas yang seperti ini berada dalam politik estetik rezim representasional. Rezim hierarkis yang berpandangan bahwa perubahan sosial bisa diwujudkan melalui kaum-kaum intelektual, pesohor, dan ideolog. Seni jalanan dipakai sebagai bahan motivasi hidup.

Namun bagaimana dengan visualitas seni jalanan yang tidak ada dalam dua rezim di atas? Seni jalanan tersebut biasanya dibuat oleh seniman jalanan yang frustrasi pada keadaan. Ia menyuarakan ketidakadilan. Menyuarakan pembelaan pada mereka yang tertindas dan terpinggirkan. Visualitasnya kebanyakan dipenuhi teks linguistik, lugas, dan terinspirasi pada tradisi primitif.

Pada bentuk seni jalanan seperti itu, sebagaimana dalam distribusi sensibel Rancière, adalah yang otonom. Seni jalanan seperti ini berusaha melepaskan diri dari konsensus. Inilah yang disebut sebagai bagian dari rezim estetika yang tak ambil pusing dengan aliran-aliran maupun bentuk-bentuk yang mendominasi. Termasuk tak ambil pusing dengan aturan dan kaidah dari otoritas kota tentang bentuk seni jalanan yang “ideal”.

Di dalam rezim estetika, seni dianggap mandiri tanpa terikat dengan aturan, hierarki, atau asumsi apapun. Seni tidak dibatasi oleh tuntutan harus mengedukasi dan sebagai produk buruh, tetapi juga tidak harus dibelenggu oleh konten eksklusif borjuis tertentu yang membedakannya dari kehidupan sehari-hari (realitas).

Konsekuensi dari seni jalanan rezim estetik ini adalah susahnyanya mendapat restu dari aparatus ideologi negara. Mereka distigmatisasi sebagai vandalisme. Urakan. Tidak menaati aturan. Parahnya adalah stigma: tidak mendukung visi kota yang indah dan kreatif. Biasanya, seni jalanan seperti ini akan dihapus oleh Satpol PP dan pembuatnya dikejar-kejar seperti kriminal.

Seni jalanan adalah upaya untuk meraih kebebasan yang ditawarkan dalam rezim estetik. Ia mampu menyediakan ruang bagi yang sebelumnya tidak terdengar karena ditekan oleh tatanan untuk pada akhirnya disuarakan melalui seni.

Maka di sinilah kemudian ada istilah “karya yang estetis dan politis” adalah karya yang mampu keluar dari tatanan sosial. Ranciere mengatakannya sebagai *an-arche* atau ketidak-sepakatan atas hubungan kekuasaan dan kebijakan. Istilah inilah yang kemudian dipeyoratifkan menjadi “anarki”. Alih-alih dipertimbangkan sebagai pemikiran mengenai kesetaraan, istilah ini justru disalah-kaprahi sebagai tindakan kriminalitas.\*\*\*

*\*dosen di DKV UK Petra. Kini sedang studi doktoral di Kajian Seni dan Masyarakat, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.*